



MENEROPONG PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI KABUPATEN SIDOARJO

Alia Kartika
Dian Iskandar
Universitas Palangka Raya
Email: aliakartika181@gmail.com

Article Info

Keywords:

e-government, local government, sidoarjo regency.

Abstract

This article is an e-government study that aims to see how the application of e-government in the Sidoarjo regency. To achieve this goal, the authors use qualitative research methods with Data collection techniques are literature studies.. The results obtained are, the local government Sidoarjo in implementing e-government using 3 relationship models, namely government to citizen, government to business, government to the employee. The implementation of e-government is supported by budget, regulation, strong institutional capacity, and the value instilled in the implementation of public servants commitment from the leadership is the main key that encourages the success of the implementation of e-government in government. In conclusion, the implementation of e-government in Sidoarjo Regency has a positive impact in organizing government affairs because of open access and making services more effective, efficient, and interactive.

A. PENDAHULUAN

Revolusi industri menjadi pemantik modernisasi pemerintahan, perkembangan teknologi digital mewarnai penyelenggaraan pemerintahan, mulai level nasional sampai pada level daerah. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dimulai dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Instruksi Presiden tersebut menjadi landasan bagi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik nasional, provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, demi terciptanya pemerintahan yang transparan, bersih dan akuntabel serta efektif dan efisien dalam pendistribusian dan penemuan pelayanan publik, penciptaan hubungan publik-

privat, penyediaan mekanisme komunikasi antar institusi pemerintahan dan masyarakat, serta manajemen kinerja pemerintahan.

Penerapan *e-government* memberikan dampak positif dalam pelayanan, karena memotong rantai birokrasi, sehingga pelayanan dapat diterima lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah. Pemanfaatan *E-government* mendorong adanya transparansi Pemerintah terhadap publik sendiri, sehingga masyarakat dapat mengakses *website* yang telah disediakan Pemerintah untuk melakukan transaksi ataupun proses pembuatan perizinan, dan lain sebagainya.

Adanya otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, secara eksplisit pemerintah daerah memiliki tugas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dan menyelenggarakan setiap urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, termasuk dalam pengembangan *e-government* di daerah, tanpa terkecuali Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo dengan ibukota Sidoarjo ini terletak di provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Selat Madura sebagai batas timurnya dan Kabupaten Pasuruan untuk batas selatan, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto di Barat. Kabupaten ini dipimpin oleh H.Ahmad Mohdlor Ali, S.IP, selaku Bupati dan H. Subandi, S.H. adalah Wakil Bupatinya. Kabupaten yang memiliki visi untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan dengan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Misi tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Maka dari itu, artikel ini akan melihat mengenai penerapan bagaimana penerapan *E-government* di Kabupaten Sidoarjo.

B. METODE PENELITIAN

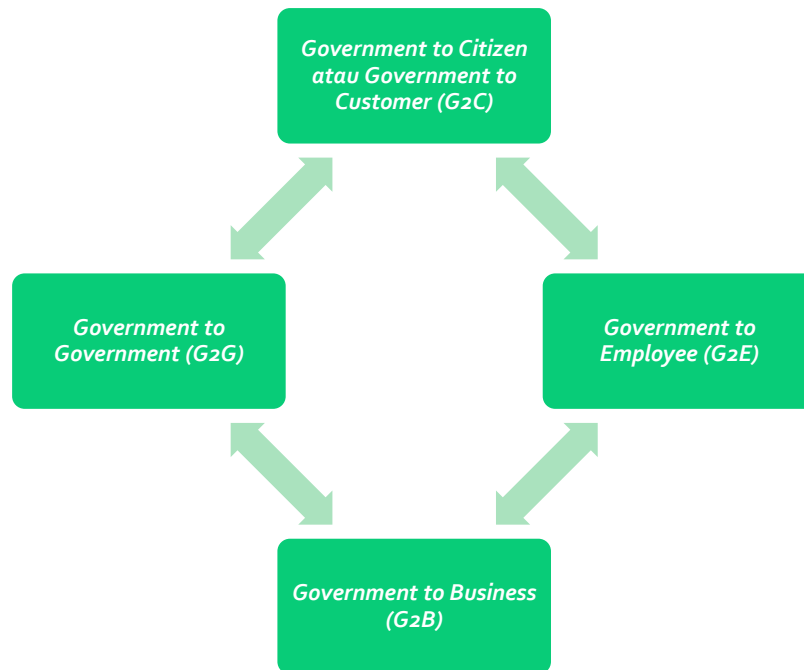
Studi ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif untuk melihat bagaimana penerapan *e-government* di Kabupaten Sidoarjo. Studi literatur sebagai metode pengumpulan data, baik dari pemberitaan media massa, jurnal, dan dokumen lainnya, waktu, sumber data, cara apa data diperoleh kemudian diolah dan dianalisa dalam tradisi kualitatif.

C. HASIL DAN DISKUSI

E-government Sebagai Suatu Landasan dan Pola Relasi

E-government berfokus pada layanan online atau berbasis website yang membantu mengoptimalisasikan layanan kepada masyarakat, meningkatkan interaksi antara pemerintah dengan sektor swasta dalam lingkup bisnis dan industri, serta menyediakan akses informasi sebagai bentuk transparansi. Ketika terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan transparan maka bisa disimpulkan bahwa penerapan *E-government* yang dilakukan pemerintah berjalan dengan baik, sehingga membuat masyarakat merasa bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap keperluan masyarakat dalam sistem pelayanan publik berhasil dilakukan.

E-government memiliki beberapa bentuk interaksi yang memperlihatkan relasi antara pemerintah dan stakeholdernya. Berikut model relasi e-government yang dikemukakan oleh Indrajit, R.E (2004).



Gambar 1. Model Relasi *E-government*

1. *Government to Citizen atau Government to Customer (G2C)*

Government to Citizen/Customer merupakan sebuah penyampaian informasi pelayanan publik oleh Pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. G2C memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dan melakukan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. G2C ini memiliki tujuan agar lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat.

2. ***Government to Employee (G2E)***

Penyediaan layanan secara online bagi para aparatur pemerintah yang bekerja sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kinerja para aparatur pemerintah agar dapat terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

3. ***Government to Business (G2B)***

Government to Business merupakan penyediaan pelayanan berbasis digital oleh Pemerintah yang berada dilingkungan bisnis yang kondusif dalam suatu Negara, yang membuat para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka. Para pelaku bisnis akan banyak berinteraksi dengan pemerintahan, untuk itu perlu dibuat hubungan yang baik antar keduanya.

4. ***Government to Government (G2G)***

Layanan online yang disediakan oleh pemerintah untuk saling berinteraksi dengan instansi pemerintahan lainnya agar dapat memperlancar kerjasama. Hal ini didorong dari kebutuhan negara untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi antrara satu pemerintah dan pemerintah lainnya dalam proses diplomasi, administrasi perdagangan, hubungan politik, dan lain-lain.

Meneropong Penerapan *E-government* di Kabupaten Sidoarjo

Penerapan *e-government* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan sistem pelayanan pada suatu wilayah, termasuk Kabupaten Sidoarjo. melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan System Informasi, Telematika dan Sandi di Kabupaten Sidoarjo menjadi dasar penyelenggaraan *e-government* di daerah ini. Beberapa hal penting yang dilakukan dalam penerapan *e-government* di Sidoarjo, yaitu dukungan dari pimpinan pemerintahan, adanya regulasi dan ketersediaan anggaran, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, serta nilai yang dipegang dalam implementasinya.

Dalam penerapannya di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah kabupaten memberikan dukungan yang penuh dalam penerapan teknologi pada penyelenggaraan pemerintahan. Pendanaan menjadi faktor penting dalam pengembangan dan penerapan *e-government*. Kabupaten Sidoarjo memberikan dukungan pendanaan yang besar untuk inovasi *e-government*, dan pengadaan hardware maupun software yang menunjang kinerja pemerintah. Alokasi dana yang

didapatkan khusus melalui regulasi atau kebijakan pemerintah mengenai perkembangan teknologi pada penerapan sistem *e-government*.

Dalam hal kelembagaan, kapasitasnya diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi koordinator yang mengelola pengembangan dan penerapan *e-government* secara efektif di lingkup pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, artinya pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjamin bahwa kapasitas kelembagaan memiliki payung hukum yang jelas, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan tersebut, selain itu sumber daya manusia yang unggul menjadi indikator dalam penguatan kelembagaan hal ini dilihat dari kemampuan sumber daya manusianya yang mampu menciptakan banyak inovasi aplikasi dan website yang ada di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, Kabupaten Sidoarjo menciptakan beberapa inovasi baik dalam bentuk website maupun aplikasi pemerintah mengotomasikan proses manual, seperti yang terpasang pada halaman homepage <https://www.sidoarjokab.go.id/> adapun bentuk layanannya yaitu D-S3, e-KIR, e-MONKAS, e-PBB, e-REKLAME, e-PARLEMEN, m-BONK, MATADELTA, SIAP TARIK, SiGAP, m-SIPADU, SIKOLING, In KamRS, Alamak, ReMics, e-Tamat, SiMaNeis, Santri RS, TUKUO, E-KLIPING, SIDIRA, SITC, E-BPHTB, SIDALI, SATE KREMBUNG ANTRIAN DISDUKCAPIL, Berkas Mlaku Dewe (BMW), SIKADA, SI CANTIK, ANTRIAN MPP, SI ABON, SI PRAJA, dan LESTARI. (Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Sidoarjo, 2020) Selain itu juga terdapat aplikasi yang memperbaiki proses manajemen kinerja pemerintahan agar menjadi efisien dan mempermudah pelayan dalam penyelenggaraan pemerintahannya seperti CSR, E-Money, KGB, SiPekat, SKP, SiBangsda, SIMPEG, TKPKD, SimLitbang, Siksda, Lapor BOS, DAPODIK, CUTI ONLINE, DAPODIKD ASMEN, SEMAR SIDOARJO, BPS, dan e-consuling (Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Sidoarjo, 2020). Mengingatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan dapat mengurangi cost antara pemerintah dan warga negara, serta meningkatkan kualitas dan aksestabilitas pelayanan. Selain itu Kabupaten Sidoarjo memiliki kanal informasi publik seperti Dataku, Gema Delta, Bakohumas, SJDIH, PPID, SISKAPERBAPO, Mall Pelayanan Publik, E-KRAF, DAGULIR, Rumah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Sidoarjo, 2020), yang mana aplikasi tersebut menjadi media bagi stakeholder untuk mendapatkan informasi yang disajikan secara akuntabel dan transparan.

“Lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik”, menjadi nilai yang diinternalisasikan dalam penerapan *e-government* di Kabupaten Sidoarjo. Transformasi digital yang dilakukan menjadi agenda reformasi sektor publik, merupakan cara baru untuk berinteraksi dengan berbagai *stakeholder*. Penerapan pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo menggunakan model hubungan interaksi *government to citizen*, *government to business*, dan *government to employee*, dimana pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan atau menyediakan layanan kepada warga, sektor bisnis dan pegawai jika kita melihat dari aplikasi maupun trend website yang diciptakan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melalui penerapan *e-government* mendapatkan banyak apresiasi dari pemerintah pusat, karena inovasi membuat system dan manajemen kerja birokrasi online, baik perintah kerja, komunikasi maupun koordinasi dilakukan secara online, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun sektor bisnis dalam mengakses layanan publik. Optimalisasi dilakukan dalam setiap komponen *e-government* yang sudah dilaksanakan.

Pucuk pimpinan di Kabupaten Sidoarjo menjadi kunci utama dalam penerapan *e-government* dan memainkan peranan penting, karena komitmen untuk melakukan reformasi pelayanan menggunakan teknologi dalam manajemen kinerja pemerintah, mendukung dan mengadopsi system baru. Kesadaran pemimpin dalam penerapan *e-government* secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas layanan, itulah yang dimiliki oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, yang dibuktikan dengan adanya dorongan maksimal dalam pengembangan dan penerapan *e-government* di wilayah kekuasaannya.

D. KESIMPULAN

Penerapan *e-government* di Kabupaten Sidoarjo memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja pemerintah menjadi lebih

efisien termasuk dalam penyediaan dan pendistribusian layanan publik. Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintah menjadi wahana baru dalam berinteraksi dengan berbagai *stakeholder*. Komitmen perubahan oleh pimpinan menjadi hal utama dalam penerapan *e-government* di Kabupaten Sidoarjo, karena memberikan dukungan regulasi dan anggaran, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan menginternalisasikan nilai-nilai positif dalam memberikan layanan, sehingga menjadikan penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien dan interaktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta: Andi
- Indrajit, Ricardus Eko, Rudianto Dudy dan Zainuddin Akbar. 2005. *E-Government in Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*
- Kabupaten Sidoarjo. (2020). *Layanan Sidoarjo*. Retrieved from Kabupaten Sidoarjo: <https://www.sidoarjokab.go.id/site/>
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan System Informasi, Telematika dan Sandi di Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- World Bank. 2020. *The E-government Handbook for Developing Countries*